

**UPAYA PENANGGULANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ATAS
PENYALAHGUNAAN MONUMEN SIMPANG LIMA GUMUL KEDIRI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RAFI UDIN ABDILLAH
115010100111097



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

UPAYA PENANGGULANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ATAS PENYALAHGUNAAN MONUMEN SIMPANG LIMA GUMUL KEDIRI

Rafiudin Abdillah, Lutfi Efendi S.H.,M.Hum, Agus Yulianto S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail : rafidn@gmail.com

Abstraksi

Monument Simpang Lima Gumul Kediri yang menjadi ikon dari Kabupaten Kediri telah menjadi kawasan pusat bisnis, perdagangan dan wisata, dengan hadirnya monument ini menjadi objek pekerjaan baru bagi Satpol PP dalam menjaga asset yang berada di dalamnya, karena banyak sekali kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan ini, baik positif maupun negative.

Kata Kunci : kinerja, upaya, ketertiban dan pelanggaran.

Abstraction

Monument Simpang Lima Gumul Kediri iconic of Kediri has become the central business district, trade and tourism, with the presence of this monument became the object of a new work for municipal police in maintaining assets that are in it, because a lot of activities in the area of public dilakukan this, both positive and negative.

Keywords: performance, effort, order and violation.

A. Latar Belakang

Peranan hukum di sebuah Negara Hukum seperti Indonesia adalah ditempatkannya hukum sebagai aturan didalam menyelenggarakan pemerintahan, kemasyarakatan dan cara bernegara yang baik. Menurut sumbernya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, termasuk hukum tertulis didalamnya adalah peraturan daerah, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah bersama DPRD yang ruang lingkup berlakunya adalah di daerah itu sendiri, dan hukum

tidak tertulis termasuk didalamnya adalah norma-norma yang tumbuh didalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum tertulis.

Perturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata wilayah Kabupaten Kediri yang mengatur tentang tata letak wilayah kabupaten Kediri termasuk hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah daerah, didalamnya berisi aturan-aturan tat letak wilayah-wilayah yang menjadi perhatian dari kabupaten Kediri, termasuk tata letak monument Simpang Lima Gumul yang berada di kecamatan Gampengrejo.¹ Monument ini dibangun sekitar tahun 2003 dan selesai tahun 2008 yang diresmikan oleh bupati pada saat itu.²

Pembangunan monument ini menghabiskan dana sekitar 300 miliar,dengan luas wilayah monument yang hampir 37 hektar ini membuat monument menjadi tempat favorit bagi masyarakat kabupaten Kediri dan sekitarnya untuk menghabiskan waktunya. Didalam monument ini terdapat asset-aset daerah, diantaranya, gedung pertemuan,Ruang Terbuka Hijau, Relief, dan masih banyak lagi, termasuk juga monument itu sendiri. Dengan dijaga oleh Satpol PP, pemerintah daerah mengharapkan agar monuumen ini menjadi basis sumber pendapatan daerah, karena didalam perda yang disebutkan diatas, kawasan ini dipergunakan untuk pusat bisnis,perdagangan, jasa, dan rekreasi.³

Satpol PP adalah organisasi public dibawah pemerintah daerah yang salah tugasnya adalah mengamankan asset daerah dan juga membantu pemerintah dalam upaya mengamankan dan menertibkan masyarakat. Berhubungan dengan adanya monument ini, satpol pp kabupaten Kediri mendapat tugas baru untuk mengamankan dan menjaga asset daerah yang berada di kawasan ini, karena disinyalir akan banyak terjadi pelanggaran karena wialyahnya yang sangat luas.⁴

Berdirinya monument ini membuat banyak perubahan yang ada di masyarakat kabupaten Kediri, dari aspek ekonomi dan sosial, baik positif maupun negative. Dampak positif yang terjadi adalah pendapatan masyarakat menjadi naik, pendapatan daerah juga

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030,Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011.

² <https://fdhly.wordpress.com/2011/01/07/pengertian-dan-tentang-represif/>(diakses pada tanggal 31 maret 2015 pukul 07.28 WIB)

³ Kediriraya.com(diakses pada tanggal 30 maret 2015 pukul 05.50)

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 72.

naik karena roda perokoniman yang cukup baik, dari aspek sosial masyarakat juga dapat mengetahui sejarah Kabupaten Kediri, karena ada perpustakaan yang disediakan disini, dan masyarakat juga tidak perlu berwisata luar kota, karena di kawasan ini sudah cukup rekreatif untuk dijadikan rujukan berwisata. Akan tetapi dampak negative yang ditimbulkan juga tidak kalah banyak, terutama dari aspek sosial, karena bannyaknya orang yang lebih suka menghabiskan waktu di monument ini, karena hampir tiap satu minggu sekali ada hiburan disini, sehingga budaya religious yang dimiliki oleh masyarakat Kediri lama kelamaan akan terkiskis.⁵

Luas yang hampir 37 hektar yang menjadi kawasan monument ini sedikit sekali penerangannya, sehingga memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk melakukan pelanggaran yang tidak diketahui petugas satpol pp. dalam observasi yang peneliti lakukan diantara pelanggaran yang terjadi, paling banyak adalah mencuri bunga dan tanaman di RTH dekat parkir, pacaran ditepi-tepi jalan yang kelewatan, mencoret-coret tembok, dan masih banyak lagi, sehingga diperlukan kesigapan Satpol PP untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terlebih lagi dengan adanya jalan lurus di dekat terminal, di belakang GPI terdapat jalan lebar dan lurus panjang yang sering digunakan para remaja untuk balapan liar. Sehingga atas dasar itulah peneliti mengambil tema tentang penertiban pelanggaran sosial di kawasan SLG, dengan judul Upaya Penanggulangan Satuan Polisi Pamong Praja Atas Penyalahgunaan Monumen Simpang Lima Gumul.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyalahgunaan fungsi Monumen Simpang Lima Gumul dan dalam penjagaan asset daerah?

⁵ Ermila Susilo, **Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul Bagi Masyarakat** Kediri, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 3

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dan hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan penyalahgunaan fungsi Monumen Simpang Lima Gumul dan penjagaan asset daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam upaya penertiban penyalahgunaan fungsi monument simpang lima gumul Kediri dan penjagaan asset daerah.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dalam mengatasi kendala yang muncul terkait penertiban penyalahgunaan fungsi monumen simpang lima dan penjagaan asset daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penyusunan skripsi ini, diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa, pemerintah, Satpol PP, masyarakat dan juga diharapkan menambah khasanah ilmu hukum yang sudah ada.

E. Sistematika Penulisan

BAB I . Pendahuluan

Bab yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini terdiri dari Tinjauan Pustaka dari Teori Kinerja, Konsep Pengendalian, Kajian Tentang Upaya, Kajian Tentang Monumen Silmpang Lima Gumul, Kajian Tentang Satpol PP, Peraturan Daerah dan Pemerintahan Daerah, dan Juga Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

BAB III : Metodologi Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dan observasi di kawasan monument simpang lima gumul dan di kantor Satpol PP yang hasil dari wawancara dan observasi tersebut peneliti hubungkan dengan peraturan dan norma yang berlaku di Kabupaten Kediri sehingga mendapatkan hasil kesimpulan.

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan

Analisis tentang kinerja Satpol PP dan membahas tentang kinerja dan pelanggaran yang terjadi, apakah penindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku apa tidak, dan upaya apa saja yang sudah dan belum dilakukan oleh Satpol PP.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan penulis sebagai masukan berkaitan dengan penelitian, daftar pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan peneliti, dan juga lampiran-lampiran yang berisi tentang daftar dokumen guna menunjang data peniltian.

F. Kajian Pustaka Dan Asumsi Dasar

- a. Konsep Kinerja dapat kita lihat dari dua sisi yaitu dari sisi individu (pegawai) atau dari sisi secara tim(organisasi). Kinerja individu adalah kinerja yang dilakukan oleh setiap individu, sedangkan kinerja tim adalah kinerja yang dilakukan oleh sebuah tim didalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan dilakukanya penilaian kinerja adalah untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah mendorong pencapaian sebuah tujuan . Syarat yang bisa digunakan untuk menjadi indicator sebuah pencapaian antara lain produktivitas, kualitas layanan,responsivitas, akuntabilitas, dan responsibilitas.
- b. Konsep Pengendalian adalah konsep terakhir dari menejemen, setelah proses perencanaan dan menejemen telah selesai dibuat, maka konsep pengendalian akan berperan untuk menentukan baik dan buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengendalian sendiri bisa diartikan sebagai usaha dalam memantau

suatu kegiatan yang telah ditetapkan di standard tertentu, untuk menetapkan standard sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

- c. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Upaya sendiri dibagi menjadi 5 yaitu upaya preventif, upaya preservatif, upaya kuratif, upaya adaptif, dan upaya represif.
- d. Monumen Simpang Lima Gumul adalah bangunan berbentuk persegi yang berada di kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Perancis. Monument ini digagas oleh bapak Sutrisno selaku Bupati Kediri waktu itu pada tahun 2003 dan baru diresmikan tahun 2008. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Monumen ini dilalui 5 arah jalur, yaitu persimpangan arah selatan ke Wates/pesantren, Timur Ke Gurah – Utara ke pagu – arah timur laut ke Pare – dan arah ke Barat ke Kota Kediri. Tujuan awal dibangunnya kaasan ini adalah sebagai sentra ekonomi baru di Kabupaten Kediri. Monument ini berluaskan 37 hektar, dengan banyak asset daerah didalamnya, diantaranya adalah convention hall, bank daerah, ruang terbuka hijau, gumul paradise ilan dan masih banyak lagi.⁶
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas dari Satpol PP adalah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan fungsinya antara lain adalah penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- f. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

⁶ Wongkediri.net (diakses 30 maret 2015 jam 06.00)

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah sendiri adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala daerah dan DPRD dan berlaku hanya pada batas wilayah daerah tersebut.

- g. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, teratur dan sesuai dengan peraturan dan norma yang ada. Dan Perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP itu sendiri adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

- a. **Jenis Penelitian** yang digunakan oleh peneliti berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah Yuridis Empiris yang artinya melihat atau meneliti hukum, peraturan dan norma yang berlaku dengan mengkaitkan keadaan atau praktek yang terjadi.
- b. **Pendekatan Penelitian** yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berkaitan dengan upaya Satpol PP ini adalah dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang artinya adalah melihat hukum atau peraturan dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, karena dalam penelitian ini di fokuskan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar peraturan dan norma yang terdapat dalam Kabupaten Kediri.
- c. **Alasan Pemilihan Lokasi** yang menjadi dasar pemilihan peneliti yang pertama adalah karena keberadaanya monument itu sendiri, yang kedua adalah

banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan sosial yang terjadi di dalam kawasan monument.

- d. **Jenis dan Sumber Data** yang diperoleh peneliti dibedakan menjadi 2, yang pertama data primer yang diperoleh peneliti dari informan yang terdiri dari Satpol PP, PKL, dan Pengunjung, data sekunder berasal dari arsip Satpol PP itu sendiri, dan sumber data nya berasal dari informan-informan diatas.
- e. **Teknik Memperoleh Data** yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini menggunakan wawancara kepada anggota Satpol PP, Pengunjung, dan PKL dan observasi dilakukan peneliti di kantor Satpol PP, kawasan monument SLG dan studi dokumen.
- f. **Populasi dan Sampel** yang menjadi subjek penelitian pada penyusunan skripsi ini terdiri dari Satpol PP, Paguyuban PKL, dan Pengunjung monument sebagai populasi dan Kepala Satpol PP, anggota Satpol PP, beberapa pengunjung, dan 4 PKL sebagai sampelnya.
- g. **Teknik Analisis Data** yang peneliti gunakan adalah kualitatif artinya upaya yang dilakukan dalam proses penelitian dengan cara menggunakan data sebagai objek dalam penelitian, peneliti menggunakan data untuk selanjutnya di organisasikan, dipilah-pilah, mencari, dan menemukan pola, dan menemukan apa yang dapat dipelajari, sehingga tahap akhirnya dapat didapat kesimpulan yang dapat dipublikasikan.
- h. **Definisi Operasional** dari penelitian ini adalah tentang Upaya, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Fungsi.

H. Pembahasan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat di sebutkan bahwa pembahasan penelitian ini mengacu pada 2 poin, yang pertama yaitu kinerja dari Satpol PP terhadap penertiban, pengamanan dan penjagaan asset daerah yang berada di kawasan monument SLG, dan yang kedua adalah hambatan apa saja yang dialami oleh Satpol PP dan cara mengatasinya. Berdasarkan itu peneliti akan menguraikan secara singkat pembahasan kedua poin tersebut.

Kinerja Satpol PP dalam Kinerja dari Satpol PP dalam upaya penertiban, pengamanan, dan penjagaan asset daerah di kawasan monument SLG dapat dilihat dari beberapa indicator antara lain⁷:

- a. **Produktivitas**, penelitian yang melihat antara input yang diberikan oleh Satpol PP dengan prestasi atau keberhasilan yang diperoleh yang berupa ketertiban dan keamanan dan banyak atau sedikitnya pelanggaran yang terjadi di kawasan Monumen SLG ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti telah lakukan di kantor Satpol PP dan monument, maka peneliti dapat melihat bahwa input yang diberikan atau kegiatan,aktivitas yang dilakukan oleh Satpol PP kurang maksimal, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP dan saran prasarananya kuranglah mendukung, dengan SDA dan sarana prasaran yang terbatas, maka upaya penertiban dan penjagaan monument sedikit terhambat.
- b. **Kualitas Layanan**, yang dimaksud kualitas layanan adalah tingkat kepuasan para pengunjung dan PKL atas kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam upayanya mengamankan, menertibkan dan menjaga asset daerah . berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, maka dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat amatlah beragam, ada yang berpendapat bahwa peran dan kinerja Satpol PP kurang maksimal, kurang begitu terlihat dan ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa Satpol PP sudah cukup mengayomi dan usaha yang dilakukan dalam pengendalian PKL dan penertiban pengunjung supaya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada .
- c. **Responsivitas**, pada indicator ini tingkat responsivitas Satpol PP diukur dari cepat atau tidaknya mengenali kebutuhan masyarakat, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga dilihat dari cepat atau tidaknya tanggapan dari Satpol PP untuk memenuhi aspirasi masyarakat, contoh ketika terdapat balapan liar, tingkat responsivitas Satpol PP tinggi, mkarena anggota Satpol PP langsung bergerak ke tempat atau arena balapan liar di kawasan

⁷ Mita Mirnawati, **Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon**, Skripsi diterbitkan, Serang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012, hlm 20

SLG dan berusaha menertibkannya dengan cara membubarkannya setelah mendapat aduan dari masyarakat. Tetapi dalam kasus lain seperti cara penindakan terhadap pelanggaran pacaran yang melewati batas, Satpol PP tampaknya kurang begitu tanggap terhadap aduan-aduan masyarakat, meskipun sebenarnya tanpa ada aduan masyarakat pun seharusnya Polisi PP dapat langsung memberikan sanksi yang tegas karena sudah melanggar norma dan adat yang ada di Kabupaten Kediri.

- d. **Responsibilitas** yang dimiliki Satpol PP dalam penanganan pelanggaran yang terjadi di kawasan monument SLG ini cukup besar, terbukti dengan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menemukan bahwa ketika Satpol PP menemui pelanggaran yang terjadi, maka Satpol PP dapat langsung menindak lanjuti pelanggaran tersebut dengan sanksi administrative, contohnya ketika ada pencuri bunga, Satpol PP memberikan sanksi bahwa pelaku diharuskan membayar 10 kali lipat dari bunga yang dicuri atau dirusak, dan responsibilitas atau tanggung jawab Satpol PP juga ditunjukkan dengan selalu berpatroli keliling mengitari monument sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab atas penjagaan asset daerah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri.
- e. **Akuntabilitas** adalah bentuk pertanggungjawaban Satpol PP kepada para pengunjung dan PKL atas tugas yang diberikan pemerintah daerah kepadanya, dalam indicator ini Satpol PP diwajibkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan para pengunjung dan PKL agar pengunjung bisa maksimal menikmati kunjungannya dan PKL bisa maksimal dalam menjual dagangannya. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan sejak hari Jumat 20 maret 2015 dapat peneliti lihat bagaimana tingkat akuntabilitas dari Satpol PP, polisi PP yang berjaga di kawasan monument berusaha menertibkan kondisi yang dirasa mengganggu kenyamanan pengunjung dan PKL, seperti pembersihan atau patrol anak jalanan dan pengamen, karena beberapa kali peneliti menemukan ada pengamen yang mengganggu kenyamanan pengunjung yang dirazia oleh Satpol PP.

Atas dasar indicator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengunjung dan PKL di kawasan monument Simpang Lima Gumul sudah baik, akan tetapi masih banyak lagi yang perlu ditingkatkan , diantaranya produktivitas dari Satpol PP sendiri dan ketanggapan akan aduan-aduan dari masyarakat terutama dengan adanya balap liar dan pacaran yang melewati batas. Dengan terjawabnya poin permasalahan kesatu maka peneliti akan menguraikan tentang permasalahan kedua yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Satpol PP dan upaya dari Satpol PP untuk mengatasi hambatan tersebut, berikut akan peneliti paparkan hambatan-hambatan yang terjadi:

- a. Para pengunjung monument memiliki kesadaran yang rendah dalam usaha menjaga asset daerah, dan para PKL juga belum bisa melaksanakan sepenuhnya peraturan yang ada;
- b. Kurangnya sarana dan prasaran yang ada di kawasan SLG, seperti penerangan yang sangat kurang, cctv yang tidak ada, dan papan-papan larangan yang jumlahnya masih sedikit;
- c. Kurangnya instansi yang bertugas untuk mengamankan masyarakat dan pengunjung disana, hanya ada 1 instansi saja yang aktif dalam usaha mengamankan dan menertibkan segala bentuk aktivitas masyarakat, baik yang positif maupun negative;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki satpol pp, seperti ruang kerja yang belum baik, alat komunikasi, alat pengaman dan sarana penunjang lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya belum optimal;
- e. Kurangnya jumlah personil Satpol PP yang berjaga disana, dan yang berjaga mayoritas adalah tenaga kontrak, sehingga profesionalitas dalam bekerja pun belum begitu baik.
- f. Tidak adanya kewenangan bagi Satpol PP dalam menindak kasus-kasus yang dilakukan di dalam kawasan monument SLG, seperti kasus pacaran yang melewati batas yang banyak terjadi;
- g. Kurang terjalinya koordinasi dengan instansi lain yang terkait, terbukti dengan adanya pengeroyokan kepada anggota Satpol PP oleh geng motor, padahal

sebelumnya sudah disepakati bahwa yang bertugas nantinya adalah dari Satpol PP, Provos, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan;

- h. Hasil pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Satpol PP dalam hal penambahan jumlah pegawai Satpol PP belum ada hasil yang nyata, sehingga terpaksa pihak Pol pp melakukan rekrutmen tenaga kontrak, dan hasilnya apa adanya, karena tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni;
- i. Kurang adanya upaya yang nyata dari Satpol PP dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya dalam hal pacaran yang melewati batas, terbukti dengan observasi yang peneliti lakukan di SLG, masih banyak orang-orang yang pacaran yang disitu sudah melakukan kegiatan yang tidak semestinya dilakukan, dengan luas area yang begitu besar, maka setidaknya satpol PP juga patroli di jalan-jalan yang berada dikawasan SLG.

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas, Polisi PP melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum dan juga dalam hal menjaga asset daerah. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada para pengunjung dan para PKL tentang peraturan yang ada di kawasan SLG dengan cara menegur ketika melanggar;
- b. Meskipun Satpol PP dalam hal sarana dan prasarana kurang begitu baik, tetapi tetap menjalankan tugas dengan baik, terbukti dengan tidak adanya CCTV dan penerangan yang baik, Satpol PP bisa menangkap para pelaku pelanggaran;
- c. Satpol PP sudah berkoordinasi dengan dinas lainnya yang terkait agar bisa membantu dalam mengamankan dan menertibkan, diantaranya adalah DKP yang turut serta membantu mengawasi taman di RTH;
- d. Dalam upayanya menjaga monumen, antara satu dengan lainnya berkomunikasi, meskipun dalam hal alat informasi yang belum begitu baik, Satpol PP mulai menerapkan setiap satu jam lapor ke kantor, dan dalam hal alat pengamanan yang kurang mencukupi pula Satpol PP sudah mengajukan anggaran untuk mendapatkan sarana yang lebih baik;

- e. Dalam hal masalah kekurangan personil, kepala Satpol PP sudah mengajukan rancangan untuk menambah jumlah pegawai kepada Pemerintah Daerah;
- f. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasipelanggaran yang terjadi karena pacaran, Satpol PP hanya mongobrak-obrak para pelaku, dan terus berpatroli, sehingga pelanggaran yang demikian itu dapat diminimalisir;
- g. Kepala Satpol PP sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terutama untuk ikut mengamankan dan menjaga asset daerah yang berada di kawasan SLG, terutama yang berkaitan dengan maslah lalu lintas;
- h. Kepala Satpol PP terus berupaya meminta penambahan jumlah pegawai, karena dengan beban kerja yang begitu banyaknya dan tidak diimbangi dengan jumlah personil, akan menjadikan tidak optimalnya kinerja dari Polisi pp itu sendiri dalam hal menjaga asset daerah;
- i. Patroli keliling yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal menangani pelanggaran pacaran yang melewati batas di area monument, di kawasan RTH 1 dan 2 sudah meminimalisir terjadinya tingkat pelanggaran.

I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan poin pertama tentang kinerja Satpol PP dan kedua tentang hambatan yang dialami Satpol PP dan upaya dalam menghadapinya dapat peneliti simpulkan bahwa kinerja Satpol PP kabupaten Kediri dalam tugasnya mengamankan dan menertibkan masyarakat atau pengunjung dan PKL dan juga tugasnya dalam menjaga asset daerah secara umum sudah baik dan benar, akan tetapi karena Pemerintah Daerah yang kurang begitu memperhatikan Satpol PP menjadi hambatan tersendiri bagi Satpol PP, seperti Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sarana dan prasaran yang kkurang , penerangan di kawasan monument yang kurang dan masih banyak lagi, dan itu semua menjadi hambatan bagi Satpol PP, dan dalam upayanya menghadapi hambatan-hambatan tersebut Satpol PP berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kekurangan yang ada, missal dengan memperkerjakan tenaga kontrak, memaksimalkan penggunaan SDA maupun sarana dan prasarana dan masih banyak lagi.

J. Saran

Observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Satpol PP dan SLG membuat banyak masukan yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada Satpol PP khususnya dan Pemerintah Daerah Kediri pada umumnya. Yang pertama yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP, dapat dikatakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, responsibilitas yang dimiliki sangat kurang sekali, sehingga membuat kinerja dari Satpol PP kurang begitu maksimal, melihat dengan kondisi kawasan monument SLG yang begitu sangat luas dengan dijaga hanya 8 orang saja, maka akan sangat kurang, maka saya menyarankan sama Pihak Satpol PP agar responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanannya di maksimalkan, seperti contohnya dalam hal pencatatan pelanggaran, hal ini sangat perlu dilakukan sehingga menjadi pedoman untuk evaluasi dan menentukan progam kerja kedepannya. Bagi pemerintah, peneliti memiliki saran bahwa pemerintah harus berani belanja pegawai dan sarana prasaran untuk Satpol PP guna memaksimalkan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang ada di Satpol PP.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

Mita Mirnawati, **Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon**, Skripsi diterbitkan, Serang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2012.

Jurnal

Ermila Susilo, **Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Simpang Lima Gumul Bagi Masyarakat Kediri**, Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030, Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 72.

Internet

<https://fdhly.wordpress.com/2011/01/07/pengertian-dan-tentang-represif/>

Kediriraya.com

Wongkediri.net